



# KIP Tidak Tepat Sasaran

JOGJA—Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Jogja belum tepat sasaran. Banyak anak dari keluarga kaya yang menerima bantuan pendidikan tersebut. Di sisi lain, banyak anak miskin yang malah belum memiliki KIP.

Salsabila Annisa Azmi  
[salsabila@harianjogja.com](mailto:salsabila@harianjogja.com)

Persoalan itu ditemukan dalam survei KIP di Kota Jogja oleh Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kesalahan pembantuan (*update*) data pendapatan orang tua oleh Pemerintah Pusat disinyalir menjadi penyebabnya.

Koordinator Survei IDEA Galih Pramilo mengatakan berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 13.884 peserta Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Jogja. PIP merupakan proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. KIP

Sejumlah siswa miskin tidak menerima bantuan pendidikan.

Kesalahan pendataan pendapatan orang tua disinyalir menjadi penyebab ketidaktepatan penyaluran bantuan.

diberikan sebagai tanda identitas penerima PIP.

IDEA mengambil sampel 82 siswa pemegang KIP dan menemukan 14,7% pemegang KIP di Kota Jogja tidak memenuhi kriteria miskin.

Menurut Galih, kriteria miskin berdasarkan berbagai aspek: apakah mengakses listrik PLN atau tidak,

menerima subsidi layanan kesehatan atau tidak, hingga mengonsumsi air PDAM atau sumur.

Anak yang orang tuanya memiliki pendapatan di atas Rp5 juta tidak masuk dalam kategori miskin.

"Setelah tim IDEA memeriksa pemegang KIP, ternyata ada anak yang orang tuanya memiliki penghasilan di atas Rp5 juta," kata Galih dalam Jumpa Pers Survei IDEA, Rabu (30/5).

Penyaluran KIP sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sehingga kesalahan itu, menurut survei IDEA dan ICW, disebabkan kesalahan pendataan pendapatan orang tua siswa pemegang KIP.



Muhadjir

▶ Halaman 8

### KIP Tidak...

Saat masih ada anak dari keluarga mampu yang menerima manfaat dari PIP, ada pula siswa miskin yang malah tidak memiliki KIP. Galih mengatakan 1,3% anak yang masuk dalam kriteria miskin tidak terdaftar sebagai peserta KIP. Siswa miskin yang tidak menerima bantuan pendidikan itu juga memicu persoalan lain.

Siswa miskin yang belum terdaftar diberi rekomendasi oleh anggota partai politik (parpol) untuk mendaftar PIP. "Ada temuan seperti itu di Tegalrejo, Jetis, Gedongtengen dan Mengangan. Beberapa sekolah di semua jenjang pendidikan mengaku didatangi kader parpol yang akan membantu mendaftarkan siswa penerima PIP," kata Galih.

Menurut Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No.19/2016 tentang Program Indonesia Pintar dan Surat Menteri Dalam Negeri tentang KIP Untuk mendapatkan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal, siswa miskin yang belum memiliki KIP bisa mendaftar dengan cara membawa kartu keluarga sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat.

Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT atau RW dan kelurahan atau desa terlebih dahulu.

Keterlibatan parpol merupakan dilema bagi sekolah. Wali murid yang berasal dari keluarga miskin akan protes karena anaknya belum mendapat KIP. Sementara, tambahan data yang disodorkan anggota parpol berpotensi mengacaukan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Di suatu SD ada data tambahan dari parpol, kemudian data lama dari pemerintah malah terhapus," ujar Galih.

Anggota Tim Survei IDEA Yoga Putra Prameswari mengatakan keterlibatan parpol dalam pendataan siswa miskin penerima KIP rawan dijadikan alat politik untuk menggagat suara pemilih untuk Pemilu 2019. "Seharusnya progra jaminan sosial tidak dijadikan alat politik untuk menjaring suara," ucap dia.

Dalam survei tersebut, sebanyak 95,9% responden penerima KIP mengatakan KIP telah membantu mengurangi beban pendidikan. Namun, 4,1% mengatakan KIP tidak membantu meringankan beban pendidikan.

#### Kesulitan Pencairan

Uang yang diterima siswa penerima bantuan pendidikan PIP bervariasi sesuai jenjang pendidikan. Murid sekolah dasar dan sederajat mendapat Rp450.000 per tahun, siswa SMP dan sederajat menerima Rp750.000 per tahun, sedangkan murid

SMA dan sederajat mendapatkan Rp1 juta per tahun.

Namun, beberapa pemegang KIP di Kota Jogja kesulitan mencairkan uang yang ditransfer ke rekening bank tersebut. Menurut temuan IDEA dan ICW, sebanyak 45,7% pemegang KIP di Kota Jogja baru mencairkan dana sekali dan ada 4,3% pemegang KIP yang sama sekali belum pernah mencairkan dana.

Mereka yang belum pernah mencairkan dana rata-rata selalu mendapati rekening KIP masih kosong. Padahal, sekolah sudah memberi pengantar bahwa dana KIP sudah bisa dicairkan.

IDEA juga mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi pemilik KIP saat mencairkan uang pendidikan. Sebanyak 42,9% pemegang KIP mengeluhkan jarak menuju ke bank yang terlalu jauh. Selain itu, 28,6% responden merasa kesulitan memenuhi syarat pencairan dana. Kesulitan itu biasanya dihadapi saat pemegang KIP membawa surat pengantar dari sekolah untuk diproses ke kelurahan.

Survei KIP tidak cuma digelar di Kota Jogja, tetapi juga di Medan, Kupang, dan Bitar. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 700 responden selama Januari sampai Februari 2018. IDEA dan ICW juga mengadakan *focus group discussion* serta menelusuri sebagian keluarga yang anaknya menerima KIP.

Yoga mengatakan survei yang melibatkan 700 responden ini bertujuan untuk memperjelas fakta adanya kelompok keluarga kaya menengah yang menerima KIP dan kelompok keluarga miskin yang menerima KIP. "Kami mempertebal data temuan dengan metode kualitatif," kata Yoga.

#### Anggaran Pendidikan

Menurut laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada 2017 PIP diberikan kepada 17.927.308 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK; 1.364.228 siswa madrasah; dan 152.438 siswa diniah serta pondok pesantren. Secara keseluruhan, ada 18.248.287 anak usia sekolah yang didata menerima bantuan pendidikan tersebut.

Deputi Bidang Koordinator Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono mengatakan pada 2018 ini, jumlah penerima PIP sama dengan tahun lalu. Anggaran yang disalurkan mencapai Rp9,6 triliun.

Tujuan PIP adalah meningkatkan akses bagi anak usia enam sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan

pendidikan sampai tamat pendidikan menengah serta mencegah siswa putus sekolah akibat kesulitan ekonomi," ujar dia seperti dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu lalu.

Namun, belum semua siswa yang menjadi target penerima PIP pada 2017 menerima dana. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan dana yang telah disalurkan baru 74,50% atau untuk 13.356.424 anak. Sementara, yang sudah mencairkan baru 2.251.586 siswa. "Atau 16,78 persen dari dana yang telah disalurkan," kata Muhadjir seperti dikutip dari *Antara*.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan tugas jوائinya adalah mengontrol input data siswa yang termasuk anggota PKH dan pemilik KMS yang dilakukan sekolah-sekolah di Kota Jogja dalam dua jalur resmi yaitu jalur kartu dan jalur usulan. Jalur kartu diinput berdasar survei Dinas Sosial Kota Jogja dan jalur usulan dimasukkan berdasar usulan wali murid yang memiliki bukti PKH dan KMS.

"Kami mendengar informasi ada jalur aspirasi juga, dari parpol. Prosedurnya kayak apa saya juga enggak tahu. Kalau benar ada, itu di luar kontrol Dinas Pendidikan. Kewenangan kami hanya sosialisasi kepada wali murid tentang dua jalur tadi dan mengontrol input data di dua jalur itu," kata Edy saat dihubungi *Harian Jogja* melalui ponsel, Rabu.

Pendaftaran peserta PIP dari jalur kartu dimulai dengan survei Dinas Sosial Kota Jogja yang hasilnya diupload ke Kementerian Sosial (Kemensos). Setelah itu Kemensos memverifikasi dan menetapkan daftar penerima PIP serta membagikan KIP kepada siswa.

Dinas Pendidikan Kota Jogja juga meminta tiap sekolah untuk mendaftarkan siswa miskin yang belum masuk dalam PIP. Semua pemegang KIP akan masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

Sementara itu, jalur usulan didahului sosialisasi sekolah kepada orang tua murid agar pemegang PKH dan KMS mengajukan data anak ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui entri data dapodik yang dilakukan tiap sekolah sekolah.

Edy enggan menanggapi terlalu jauh temuan ketidaktepatan penyaluran PIP di Kota Jogja.

"Belum ada laporan apa-apa [KIP tidak tepat sasaran], pokoknya kalau ada siswa kriteria PKH dan KMS belum memiliki KIP, segera lapor saja ke sekolah," ucap dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005